

IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT TERHADAP USAHA BUMDES TUMPANG KABUPATEN BLITAR

Sandi Wiranata¹, Slamet Muchsin², Septina Dwi Rahmawati³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: sandiwira365@gmail.com

ABSTRAK

One Village One Product (OVOP) merupakan program nasional yang diadopsi dari Jepang yang berfokus melakukan pendekatan untuk pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan suatu produk yang unik dan berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dalam implementasi program OVOP di Kabupaten Blitar sesuai dengan SK Bupati No 188 Tahun 2022. OVOP diimplementasikan di Desa Tumpang dengan potensi yang melimpah dan dikelola oleh BUMDes Tumpang yaitu ada pertanian pisang cavendish, peternakan kambing, cafe selo angon. permasalahan yang muncul terkait manajemen organisasi SDM dan pemasaran produk, sehingga terjadi tidak berjalannya usaha pertanian. Permasalahan tersebut diakibatkan karena political will dan terlibatnya orang partai politik sehingga program pengawasan, pembinaan dan bantuan tidak berjalan maksimal. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Pada penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George Edwards III, yang menjelaskan bahwa implementasi adalah hal yang paling penting dalam kesuksesan kebijakan, terdapat empat indikator keberhasilan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Bahwa dalam proses komunikasi yang berjalan kurang komunikatif, dengan sumber daya yang cukup dengan melibatkan stakeholders, kemudian disposisi Bupati Blitar yang masih political will, dan struktur yang panjang dan manajemen kurang baik. sehingga hal tersebut membuat implementasi yang berlangsung kurang berjalan secara maksimal dan dampak yang diterima oleh BUMDes Tumpang tidak sesuai dengan tujuan dari program OVOP justru mengalami penurunan dan tidak adanya keberlanjutan setelah program OVOP yang berakibat pada pembinaan dan bantuan dari Dinas tidak diterima oleh BUMDes Tumpang.

Kata Kunci: Implementasi, One Village One Product, BUMDes.

Pendahuluan

Lebih dari 77 tahun yang lalu, para pendiri Bangsa Indonesia sudah memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Melalui konsepsi ekonomi kerakyatan yang tidak bisa dilepaskan dari konstitusi negara Pasal 33 UUD Tahun 1945. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah amanah bagi penyelenggara negara Republik Indonesia, kemudian agar bisa mewujudkannya berbagai kebijakan dibuat yang dianggap tepat dan sesuai. Mengelola ekonomi sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik.

Untuk mengimplementasikan konstitusi tersebut Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi program *One Village One Product* (OVOP). OVOP awal mulanya dirintis dan dikembangkan di Jepang oleh ilmuwan bernama Prof. Morihiko Hiramitsu yang saat itu juga menjabat sebagai Gubernur Prefektur Oita, Jepang pada tahun 1980. Konsep yang digagasnya berkembang dan menyebar ke

berbagai negara termasuk di negara-negara ASEAN di antaranya adalah Negara Malaysia, Philipina, Kamboja, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Serta juga diadopsi di beberapa negara di Benua Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Selatan (<http://ikm.kemenperin.go.id/>). Berdasarkan artikel yang dimuat dalam website Kemenperin bahwa OVOP merupakan program yang terpercaya dan unggulan yang bisa meningkatkan kualitas dari usaha kecil suatu daerah sehingga penerapannya bisa berkembang di beberapa negara berkembang.

Pengembangan program OVOP di Indonesia sangat cocok diterapkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan jenis usaha paling besar dan banyak di Indonesia. Di Indonesia program OVOP mulai berjalan sejak tahun 2008 melalui Kementerian Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) awalnya pada sektor kerajinan. Saat ini program OVOP sudah diterapkan di berbagai daerah salah satunya juga di Jawa Timur. Program ini dinilai cocok untuk diimplementasikan di daerah-daerah, untuk meningkatkan potensi produk daerah sehingga dapat bersaing di pasar

nasional maupun Internasional. Pengembangan BUMDes melalui program OVOP sangat memerlukan dukungan pemerintah, *stakeholder*, dan sumber daya manusia yang baik agar dapat menciptakan produk unggulan yang berkualitas.

Oleh karena itu program OVOP sangat cocok untuk diterapkan pada BUMDes. BUMDes di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat yaitu terdiri dari 1.022 unit dan kemudian pada tahun 2020 berkembang menjadi 51 ribu unit BUMDes. Hal tersebut berarti pertumbuhan BUMDes di Indonesia sangatlah pesat mencapai 65%. Perkembangannya tentu akan berbeda-beda di setiap daerah, salah satunya perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar. BUMDes Kabupaten Blitar terdiri dari empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, tidak sehat dan tidak aktif. Dari empat kategori tersebut hanya terdapat 83 BUMDes yang sehat (Hadi, 2023).

Implementasi program OVOP juga diterapkan di Desa Tumpang yang memiliki beberapa unggulan.

“Desa Tumpang melahirkan beberapa produk seperti brownis, olahan kripik, kerajinan sepatu, jamur, olahan minuman dan produk bumdes seperti pertanian, peternakan dan cafe (mitratoday, 2022).”

Dengan banyaknya produk yang dimiliki para UMKM melalui BUMDes di Desa Tumpang, BUMDes Tumpang sendiri sudah memiliki badan hukum dengan nama resmi adalah PT. Selo Angun Makmur. Kemudian Bupati Blitar menyampaikan bahwa produk harus lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian dan diminati oleh masyarakat luas

Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha BUMDes Tumpang untuk tetap bertahan dan terus mengembangkan produknya adalah tidak adanya pengembangan, pendampingan dan pemasaran serta kurang terjaganya komunikasi dan koordinasi antara BUMDes Tumpang dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Permasalahan lainnya terkait dengan manajemen organisasi pada BUMDes Tumpang, pengembangan potensi usaha yang disebabkan oleh sikap Bupati yang memosisikan hanya *political will* sehingga, keberlanjutan, pembinaan dan bantuan tidak dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu Peran dari pemerintah daerah melalui OPD sangat dibutuhkan untuk terus mendampingi, melakukan pelatihan dan mengawasi para pelaku usaha mikro ini, melihat dari beberapa produk di BUMDes Tumpang yang dalam pengembangan produk masih belum maksimal justru mengalami penurunan.

Peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini karena Kebijakan program OVOP merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang memiliki dampak besar pada kemajuan suatu negara melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu kebijakan ini sangat menarik untuk diteliti oleh peneliti khususnya di

daerah Kabupaten Blitar tepatnya di BUMDes Tumpang yaitu PT. Selo Angon Makmur. Dengan melihat potensi yang ada dan BUMDes Tumpang juga sempat mengalami masa kejayaannya hingga mengalami proses penurunan seperti saat ini. Lalu apakah program OVOP di Kabupaten Blitar memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disini peneliti kemudian merumuskan masalah terkait dengan implementasi program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program OVOP yang dilaksanakan oleh Dinas PMD?
2. Bagaimana dampak program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang?

Tujuan Penelitian

Setelah dijelaskan rumusan masalah pada penelitian ini, Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi program OVOP yang dilaksanakan oleh Dinas PMD.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak program terhadap usaha dari BUMDes Tumpang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang membahas soal implementasi program OVOP kedepan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti, serta melatih daya berpikir kritis dan kepekaan peneliti terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat serta bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi program OVOP.

Bagi Universitas Islam Malang: Untuk menambah koleksi pustaka serta menjadi referensi bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang pada umumnya. Sebagai bahan Universitas Islam Malang untuk menuju kampus yang lebih berkualitas berbasis pada riset dan penelitian dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Bagi Instansi: Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang pelayanan publik khususnya perekonomian desa berbasis UMKM Desa.

Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (dalam Nugroho: 1), menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dan terstruktur implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya persiapan dan perencanaan sangat penting tapi hal yang paling utama adalah proses perumusannya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari kebijakan, perumusan dan implementasi kebijakan harus yang paling utama dan diperhatikan dengan baik.

Menurut George Edwards III (dalam Nugroho, 2011: 90) berpendapat model implementasi kebijakan yang dia rumuskan dapat diukur tingkat keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi, terdapat tiga indikator, yaitu: (a) transmisi, (2) kejelasan, (3) konsistensi
2. Sumber Daya, terdapat empat indikator, yaitu: (1) staf, (2) informasi, (3) wewenang, (4) fasilitas.
3. Sikap atau Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

Good Governance

Menurut UNDP (dalam Dwiyanto, 2005), *good governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan Masyarakat. Kemudian ada 9 prinsip utama yang harus dijalankan dalam menerapkan *good governance*, yaitu: (1) akuntabilitas, (2) partisipasi masyarakat, (3) transparansi, (4) tegaknya supremasi hukum, (5) peduli pada *stakeholder*/dunia usaha, (6) berorientasi pada konsensus, (7) kesetaraan, (8) efektifitas dan efisiensi, (9) visi strategis.

Teori Dampak

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak memiliki pengertian yaitu benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dari situ kemudian memunculkan pengaruh yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Ada dua dampak, yaitu: (1) dampak positif, (2) dampak negatif.

One Village One Product (OVOP)

Program One Village One Product (OVOP) merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah pusat yang diadopsi dari negara Jepang untuk diterapkan di daerah yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM daerah yang memiliki produk unggulan asli daerah yang

berkualitas dan memiliki potensi daya jual yang tinggi. Tujuan adanya program OVOP adalah untuk meningkatkan pembelajaran pengunjung, meningkatkan partisipasi lokal dalam industri, dan meningkatkan keterkaitan untuk mengurangi kebocoran. Prinsip utama dari program OVOP adalah masyarakat desa dan daerah dapat menggali komoditas atau produk unggulan secara berkesinambungan. Program yang dijalankan apabila mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dilakukan riset dan pengembangan. Beberapa prinsipnya, yaitu: (1) prinsip lokal tapi global, (2) kemandirian dan kreativitas, (3) pengembangan sumber daya manusia

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena secara fundamental berhubungan langsung dengan manusia yang bergantung penting pada pengamatan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih berfokus pada makna. Metodologi kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2013:213).

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab mengenai implementasi program *One Village One Product* (OVOP) terhadap usaha BUMDes Tumpang (PT. Selo Angun Makmur). Metode yang akan digunakan adalah wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan berfokus pada Implementasi program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang. Maka dalam pencarian data penelitian, berfokus pada:

1. Implementasi Program OVOP oleh Dinas PMD Sehingga pada penelitian ini akan difokuskan sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Nugroho, 2011), yaitu:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Dampak program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang (PT. Selo Angun Makmur)
 - a. OVOP pada BUMDes Tumpang
 - b. Pembinaan BUMDes Tumpang
 - c. Permasalahan dalam Pembinaan BUMDes Tumpang

- d. Dampak negatif dan dampak positif dari program OVOP di Kabupaten Blitar.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian berlangsung. Lokasi pada penelitian berada di:

1. Jl. Nias No. 2, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Dengan situs penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Jl. Anggrek No. 6, Desa Tumpang, Kec Talun, Kab Blitar, Jawa Timur. Dengan situs penelitian Kantor Desa Tumpang dan Sekretariat BUMDes Tumpang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

- a) Data Primer
Data yang bersumber langsung dari informan yaitu penggerak swadaya Masyarakat ahli muda, penyusun rencana penguatan kelembagaan Masyarakat, analisis monitoring, evaluasi & pelaporan, pendamping Bumdes Kab Blitar dan Komisaris utama Bumdes Tumpang.
- b) Data sekunder
Data sekunder diperoleh melalui peraturan undang-undang, dokumentasi, buku, artikel, berita terkait, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara
Prosedur wawancara dilakukan secara terstruktur di mana peneliti sebelumnya menyiapkan panduan wawancara yang berupa kisi-kisi pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini juga sudah sesuai dengan topik penelitian yang hendak diteliti yaitu memilih orang-orang yang langsung menangani pada bagian program OVOP di Dinas PMD, serta berurusan langsung dengan pemberdayaan desa dan BUMDes di Kabupaten Blitar, kemudian dari pihak pembina BUMDes dan Pengurus BUMDes Tumpang.
- b) Observasi
Cartwright (dalam Herdiansyah, 2010: 131) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku objek secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Meliputi melihat kondisi lapangan, struktur dan visi misi organisasi, SK program OVOP Kab Blitar.
- c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk pelengkap hasil dari penelitian. adapun beberapa dokumentasi yang terkait dengan Penerapan Program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang, berupa foto dan rekaman audio dari sumber yang akan di deskripsikan oleh peneliti dengan tata bahasa yang ilmiah.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 246-247) berpendapat bahwa, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu:

- a) Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi hal tersebut dilakukan untuk meneliti penerapan program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang yang dilakukan pada Juni 2023.
- b) Reduksi Data
Pada penelitian ini reduksi data akan diperoleh di Dinas PMD dan Desa Tumpang yang berkaitan langsung dengan BUMDes Tumpang. Penulis kemudian akan mengambil inti data yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Penyajian Data
Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok penelitian langkah selanjutnya adalah peneliti harus mengelompokkan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan dibahas lebih detail lagi. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023 dengan melakukan pembuatan analisis berdasarkan data yang didapatkan dengan landasan teori serta menyajikannya dalam hasil penelitian dan pembahasan.
- d) Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimulai dengan menyesuaikan antara teori yang dipakai yaitu implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Nugroho, 2011) dengan implementasi program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang Kabupaten Blitar.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas yang akan digunakan menggunakan dengan triangulasi. Ada 3 jenis triangulasi dalam keabsahan data, yaitu meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga teknik triangulasi, dalam mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan

mencari kebenaran dari berbagai sumber dari hasil wawancara, dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar, untuk mengetahui terkait dengan Implementasi program OVOP terhadap usaha BUMDes Tumpang. Dari hasil tersebut peneliti dapat memberikan perbandingan informasi yang didapatkan ketika melakukan observasi di lapangan. Berikut bagaimana peneliti melakukan triangulasi sumber.

Pembahasan

Implementasi Program OVOP pada BUMDes Tumpang

Implementasi program OVOP di kabupaten blitar berjalan semenjak bupati terpilih Rini Syarifah menjabat dan dimulai implementasinya pada tahun 2022. Tentunya tujuan program OVOP di Kabupaten Blitar dijalankan juga sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Blitar yaitu visi untuk terwujudnya kabupaten blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia *baladun toyyibatun warabbun ghofur*.

Kemudian untuk melihat dari tingkat keberhasilan implementasi program OVOP di Kabupaten Blitar terhadap usaha BUMDes Tumpang maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III (dalam Nugroho, 2011) yang menjelaskan bahwa ada 4 indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya pembahasan keempat poin tersebut, maka berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas akan dibahas sebagai berikut:

1. Komunikasi

Kondisi BUMDes Tumpang secara detail. Jadi memang belum ada komunikasi yang inten dengan dinas terkait dan belum ada bantuan apapun sehingga selama ini kegiatan dan pelatihan yang dilakukan pada BUMDes Tumpang masih swadaya masyarakat sendiri. Jika dilihat bahwa Desa Tumpang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pariwisata, perdagangan dan juga pembinaan tapi belum ada bantuan dari dinas terkait. Permasalahanpun muncul mulai dari simpan pinjam yang macet sampai pada pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berimbas pada manajemen dan usaha BUMDes. Jadi semuanya memang masih mandiri dari Desa Tumpang dan tidak melibatkan dari dinas.

a. Transmisi

transmisi yang sudah terbilang cukup baik karena alur pelaksanaannya dari Dinas PMD yang melakukan survey ke desa kemudian disampaikan kepada staff bupati dan kemudian keputusan berada pada Bupati Blitar untuk mengkonfirmasi

kembali terkait dengan pelaksanaan program OVOP di desa sasaran.

b. Kejelasan

Aspek kejelasan petunjuk pelaksanaan program dari Bupati Blitar hanya menerbitkan Keputusan Bupati Blitar tentang tim pelaksanaan program OVOP, dimana Dinas PMD berperan sebagai sekretariat dan juga penyambung dengan desa sasaran. Jadi terkait dengan buku petunjuk pelaksanaan tidak ada, hanya sebatas surat keputusan bupati saja yang berisi posisi setiap tim yang terlibat dalam program OVOP di Kabupaten Blitar. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

c. Konsistensi

Konsistensi masih sangat kurang terlihat seperti yang dijelaskan oleh Mutiara Indah Permatasari, S.IP. yang menjelaskan bahwa program OVOP adalah *political will* dari Bupati Blitar terpilih untuk sambang desa dan bertemu dengan masyarakat karena dalam program OVOP tidak hanya membahas soal ekonomi saja melainkan semua permasalahan masyarakat juga dibahas disini seperti permasalahan jalan. Sehingga memang dalam pelaksanaan mengajak semua unsur OPD yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu yang menangani hubungan koordinasi juga melalui staf Bupati yang merupakan orang partai politik bukan dari ASN.

2. Sumber Daya

Untuk sumber daya yang tersedia tentunya ada dari berbagai *stakeholders* yang terlibat yaitu dari OPD, Bank, BUMDes atau penggiat masyarakat yang ada. Sehingga untuk pelaksanaan di lapangan tidak hanya terdiri antar pemerintah daerah dan masyarakat penerima sasaran melainkan juga melibatkan pihak-pihak lainnya. Ada 4 indikator yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Staf, staf yang tersedia yaitu OPD yang ada di Kabupaten Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang tim pelaksana program OVOP. Selain itu permasalahan muncul pada BUMDes Sasaran yaitu BUMDes Tumpang yaitu manajemen yang kurang baik sehingga sumber daya yang ada kurang terkelola secara maksimal hal ini dibuktikan dengan hanya ada badan pengurus harian yang terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.

b. Informasi, informasi pelaksanaan program OVOP juga disampaikan kepada desa sasaran melalui Dinas PMD kemudian nantinya desa akan melibatkan juga berbagai unsur masyarakat yang ada disana

mulai dari karang taruna, kelompok masyarakat, UMKM dan BUMDes.

- c. Wewenang, wewenang dalam mengimplementasikan program OVOP di Kabupaten Blitar semuanya berada pada Bupati Blitar, karena program OVOP juga merupakan *political willnya* bupati untuk melakukan sambang desa sehingga memang juga digunakan sebagai ajang untuk menaikkan elektabilitas.
 - d. Fasilitas, Bantuan sarana dan prasarana untuk kedatangan bupati, seperti panggung, *sound system*, tenda, kursi, genset, makan minum, dll jadi memang ketika pelaksanaannya segala peralatan sudah disiapkan. fasilitas untuk membantu penjualan produk BUMDes yaitu menggunakan platform *e-catalog* dengan target pembeli yaitu para OPD Kabupaten Blitar sesuai dengan arahan dari Bupati Blitar.
3. Sikap atau Disposisi
Sikap yang ada dari pemimpin daerah Kabupaten Blitar yaitu *political will* bupati, selain itu program OVOP sebenarnya adalah program nasional yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Selain itu keterlibatan staf bupati yang merupakan orang partai politik tentunya akan berdampak pada rawannya konflik kepentingan. sehingga hal tersebut yang mengakibatkan program OVOP di Kabupaten Blitar yang melibatkan usaha BUMDes Tumpang tidak mengalami peningkatan tapi justru terjadi penurunan.
 4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi OVOP Kabupaten Blitar berpedoman pada Surat keputusan bupati terkait dengan tim pelaksana program OVOP, yang terdiri dari Bupati sebagai pengarah, kemudian wakil bupati sebagai penanggung jawab, Sekretaris Daerah sebagai ketua dan Dinas PMD sebagai sekretaris dalam program OVOP. Kemudian untuk struktur yang ada pada BUMDes Tumpang saat ini hanya terdiri dari badan pengurus harian yaitu Direktur, Sekretaris dan Bendara yang bertanggung jawab langsung kepada Komisaris Utama.

Dampak Program OVOP ke Sektor Usaha BUMDes Tumpang

Program ini sesuai dengan tujuan dari Bupati Blitar yaitu sebagai salah satu cara untuk pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19. Program OVOP ini berpedoman pada potensi yang tersedia di setiap desa-desa di Kabupaten Blitar yang melimpah dan beragam sehingga tentunya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk peningkatan taraf ekonomi Masyarakat.

1. OVOP pada BUMDes Tumpang
Sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Blitar yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan

yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Maka sebenarnya sesuai dengan penjelasan dari Dinas PMD maka program OVOP ini bukanlah program yang berfokus pada ekonomi saja tapi juga menampung segala keluhan kesah dari masyarakat yang sedang dikunjungi, masalah tersebut terdiri permasalahan jalan atau lainnya. oleh karena itu disana juga mengikutsertakan berbagai pihak termasuk semua unsur OPD di Kabupaten Blitar. Sehingga sesuai dengan penjelasan tersebut bahwa memang dalam implementasi program OVOP di Kabupaten Blitar ini masih berupa *political will* karena kunjungan ini bisa digunakan sebagai untuk menggaet massa baik yang sudah mendukung Bupati maupun belum.

2. Pembinaan BUMDes Tumpang
Selain pembinaan manajemen yang dilakukan oleh dinas, juga diperlukan yang namanya monitoring sehingga untuk melihat keberlanjutan dan keaktifan dari BUMDes yang telah dilakukan bimbingan. Kemudian monitoring yang dilakukan oleh dinas ke BUMDes itu tergantung dari skala prioritas kerja Dinas PMD, jadi waktunya untuk monitoring masih tidak terjadwal dan belum pasti namun untuk pelaksanaan setiap tahun pasti ada karena memang dalam monitoring bisa dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung dari jadwal yang ditentukan. Dalam hal ini memang tidak ada kejelasan dalam program maupun monitoring untuk melihat perkembangan program OVOP paska dilakukan di desa. Karena tidak ada peraturan yang mengatur sehingga memang dalam pelaksanaan masih hanya sekedar berjalan saja dan belum menjadi program yang tersistem dengan baik.
3. Permasalahan dalam Pembinaan BUMDes Tumpang
Permasalahan yang sering terjadi pada BUMDes umumnya adalah manajemen sumber daya manusia yang paling terasa disini karena dengan SDM yang unggul mulai dari anak muda hingga orang tua, namun jika tidak terorganisir dengan baik maka kurang memberikan dampak. Kebanyakan pengurus dikelola oleh orang tua yang kurang inovasi dan memang belum sepenuhnya *all out* mengurus BUMDes karena memang belum memberikan keuntungan yang signifikan sehingga kepengurusan hanya dilakukan sebagai sampingan. Permasalahan lainnya yaitu pemasaran produk yang masih kurang dan tidak maksimal, dari pihak desa tumpang sendiri sudah membantu untuk memberikan bantuan dana desa tapi masih kesulitan. Padahal sebelumnya ada beberapa divisi dalam

kepengurusan BUMDes Tumpang yaitu divisi pertanian, divisi peternakan dan divisi pemasaran. Untuk divisi pertanian dengan produk unggulan pisang *cavendish* justru sudah pernah berjaya dengan penjualan hingga Surabaya, Malang dan sekitarnya. dengan sistem penanaman dengan memberdayakan masyarakat Tumpang dengan menganjurkan untuk menanam pohon pisang *cavendish* disetiap rumah warga sehingga waktu itu hampir setiap rumah menanam pisang *cavendish* dengan total 10.000 pohon. Namun seiring berjalannya waktu permasalahan muncul yaitu virus yang utama menyerang sehingga setelah dua kali panen sukses malah harga turun karena terkena virus. Dari pihak pemerintah daerah melalui dinas juga tidak melihat potensi yang ada di Tumpang dan tidak memperhatikan permasalahan yang ada, karena sesuai dengan penuturan Agus Salim, S.Ag, tidak ada koordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan atau pembinaan.

4. Dampak Positif
 - a. Kolaorasi dan koordinasi yang dilakukan sudah sesuai dengan SK Bupati No 188 Tahun 2022.
 - b. Adanya bantuan sarana dan prasarana Ketika implementasi program OVOP.
 - c. Potensi sumber daya yang ada pada BUMDes Tumpang yang dapat dikembangkan lagi kedepan.
5. Dampak Negatif
 - a. Komunikasi yang terjalin kurang baik sehingga menghambat proses pengembangan dan pengambilan keputusan.
 - b. Tidak adanya peraturan yang spesifik dalam prosedur pelaksanaan dan buku panduan program OVOP.
 - c. Manajemen kinerja BUMDes yang kurang baik sehingga menyebabkan pengembangan.
 - d. Sikap atau Disposisi Bupati Blitar yang menempatkan program OVOP sebagai *political will* sehingga rawan dengan konflik kepentingan

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III, sebagai berikut:

1. Implementasi program OVOP Kabupaten Blitar
 - a. Komunikasi dalam program OVOP
Dalam komunikasi yang terjalin antara Dinas PMD dan BUMDes Tumpang masih kurang dan tidak komunikatif. Dalam komunikasi ada tiga indikator, yaitu:
 - 1) Transmisi, transmisi komunikasi cukup baik dengan alur pelaksanaan dari Dinas PMD melakukan survey dulu ke desa sasaran kemudian

disampaikan ke *staff* bupati untuk menanyakan kesiapan bupati.

- 2) Kejelasan, dalam aspek kejelasan petunjuk pelaksanaan program terdapat surat keputusan dari bupati yang isinya soal tim pelaksanaan OVOP. Program yang berjalan di Kabupaten Blitar hanya terdapat surat keputusan dan belum ada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan.
 - 3) Konsistensi, konsistensi dalam program OVOP merupakan *political will* Bupati Blitar karena dalam program OVOP tidak hanya membahas soal ekonomi saja melainkan juga permasalahan lainnya seperti jalan. Selain itu koordinasi dengan Bupati Blitar melalui stafnya yang merupakan orang partai politik bukan dari ASN sehingga dalam konsistensi memang masih kurang karena birokrasi konsistensi program OVOP masih belum maksimal.
- b. Sumber Daya
Ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu:
 - 1) Staf, implementasi program OVOP melibatkan berbagai pihak yaitu OPD, penggiat masyarakat dan pemateri dalam pelatihan yang melibatkan orang dari luar. Dari sisi BUMDes staffnya masih kekurangan karena hanya ada badan pengurus harian.
 - 2) Informasi, informasi yang disampaikan pada desa sasaran dengan melakukan koordinasi kemudian desa akan menginformasikan pada peserta yang akan ikut yaitu dari karang taruna, kelompok masyarakat, UMKM dan BUMDes.
 - 3) Wewenang, wewenang berada pada bupati Blitar dan program ini sebagai *political will* sehingga memang belum maksimal karena melibatkan orang partai politik juga dan hanya sekadar befokus pada kuantitas.
 - 4) Fasilitas, fasilitas yang diberikan oleh Dinas PMD selama program OVOP berupa sound system, panggung, tenda, kursi, genset, makan minum, dll. Untuk penjualan produk BUMDes ada platform e-catalog.
 - c. Sikap atau Disposisi
Program OVOP yang berjalan di Kabupaten Blitar hanya sekadar *political will* Bupati sehingga memang belum maksimal dan terlambat karena OVOP sudah berlaku nasional pada tahun 2008. Selain itu staff bupati yang mengurus OVOP juga dari partai politik sehingga

- memang rawan konflik kepentingan dan BUMDes Tumpang yg menjadi sasaran tidak mengalami perbaikan tapi justru penurunan
- d. Struktur Birokrasi
Strukturnya berpedoman pada surat keputusan bupati tentang tim pelaksana OVOP. Dimana Dinas PMD sebagai sekretarisnya. Sedangkan pada BUMDes Tumpang strukturnya hanya terdiri dari badan pengurus harian dan komisisaris.
 2. Dampak Program OVOP ke BUMDes Tumpang
Pembinaan yang dilakukan pada BUMDes Tumpang diinisiasi oleh pemerintah desa sendiri dengan anggaran dari PADes. Dari dinas dalam melakukan bimbingan hanya berfokus pada manajemen keuangan dan struktur BUMDes. Peranan dinas dalam melakukan pembimbingan pada BUMDes masih sangat kurang karena desa masih melakukan sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya monitoring sehingga permasalahan yang ada pada BUMDes Tumpang tidak segera teratasi. Setelah program OVOP berlangsung juga tidak ada tindak lanjut setelahnya jadi memang hanya program yang penting terlaksana saja, hal ini sesuai penjelasan komisisaris BUMDes Tumpang bahwa program OVOP justru merepotkan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan sedemikian rupa, maka disini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar dibutuhkan konsep, atau peraturan yang detail terkait bagaimana pelaksanaan program OVOP dan dibuat buku pedoman program OVOP sehingga dari OPD dan BUMDes bisa mengetahui secara jelas program OVOP sehingga dalam prosesnya dapat maksimal sesuai dengan potensi desa. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan keberlanjutan dari program OVOP sehingga tidak hanya menjadi program yang penting terlaksana, oleh karena itu memang dibutuhkan payung hukum yang jelas.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas PMD harus melakukan koordinasi dan komunikasi lebih efektif dan komunikatif sehingga tidak menunggu mendapatkan informasi dari BUMDes tapi langsung jemput bola masalah yang ada pada BUMDes, karena pemerintah adalah pelayanan pada masyarakat. Sehingga Dinas bisa tanggap terhadap permasalahan yang di alami oleh BUMDes Tumpang dan permasalahan yang terjadi bisa segera ditangani. Dinas PMD juga harus melakukan

komunikasi kembali ke Bupati untuk kelanjutan program OVOP.

3. Terhadap BUMDes Tumpang jika terjadi permasalahan internal untuk lebih masif dalam melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan dengan Dinas PMD. Sehingga memang ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan bersama dengan harapan mendapatkan solusi dan bantuan. Karena BUMDes adalah inisiatif dari Desa sehingga untuk mengembangkannya dibutuhkan effort dari desa. Karena BUMDes Tumpang mengalami masalah SDM maka dibutuhkan kaderisasi yang baik terutama dari anak-anak muda, maka dibutuhkan kolaborasi dengan karang taruna atau penggiat masyarakat. Sehingga dengan SDM yang baik tentunya dalam pengelolaan sampai penjualan bisa perlahan menjadi lebih baik.
4. Untuk masyarakat Desa Tumpang juga harus ikut berpartisipasi terhadap pengembangan BUMDes Tumpang, peranan pemerintah desa juga diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. memang dibutuhkan semua pihak untuk mensukseskan program OVOP sehingga dapat memberi dampak nyata pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo
- Agustino Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Assauri. 2012. Manajemen Pemasaran. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Dwiyanto Agus. 2005. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gulo. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Grasindo Anggota IKAPI.
- Herdiansyah. 2019. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indriantoro, Nur, Bambang S. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Juran, J.M. 1993. Quality Planning and Analysis, 3rd Edition. MC-Graw Hill Book Inc. New York.
- Mardiasmo. 2009. Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Oentoro, Deliyanti. 2012. Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tjiptono. 2014. Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian. Yogyakarta
- Wahab Abdul, Solichin. 2014. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Tersiana Andra. 2022. Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Sunggong Bambang, 1994. Hukum dan Kebijakan Pulik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang:**
- UUD Tahun 1945 Pasal 33 sebagai Landasan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.
- UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Industri Kecil Menengah melalui pendekatan OVOP.
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-/IND/9/2007 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Sentra.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Sumber Jurnal:**
- Claymone, Jaiborisudhi. 2011. A study on one village one product project (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia (Jurnal Internasional). The Internasional Journal of East Asian Studies: Vol. 16 No. 1 2011.
- Gita, Yuliana, Suprayitno. 2021. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendekatan OVOP (Skripsi). Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah. ISSN Vol. 2 No. 2, Desember 2021.
- Kutsiyah Farahdilla. 2017. Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan OVOP di Kabupaten Pamekasan (Skripsi). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. P-ISSN:2354-7057 Vol. 4 No.1 Juni 2017.
- Murti, Harianto. 2019. Pendekatan OVOP Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa (Skripsi). Fakultas Teknologi Informasi Unmer Malang: ISSN 2598-0076.
- Rahmawati, S. D. 2018. Educational Tourism on Screen (ETOS). Prosiding Semnasfi, 1(1), 234-239.
- Ridwan, M. A., Muchsin, S., & Hayat, H. 2017. Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 141-158.
- Subiantoro Jhevanda. 2019. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Program OVOP Kendang Jimbe di Kota Blitar. Skripsi Administrasi Negara, Universitas Airlangga.
- Wahyudi Aris. 2016. Efektivitas dan Efisiensi Implementasi OVOP dalam Pengembangan BUMDES Gerabah di Kasongan (Tesis). Tata Kelola Seni:Vol. 2 No.1 Juni 2016. Pasca ISI Jogja.
- Sumber internet:**
- OVOP Indonesia. <https://ovop.kemenperin.go.id/> (online). Diakses pada 18 Januari 2023.